

Judul : Dana PIP Belum Sasar Anak Telantar: Pemda Jangan Tutup Mata
Tanggal : Minggu, 08 Oktober 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Dana PIP Belum Sasar Anak Telantar

Pemda Jangan Tutup Mata

Senayan menyesalkan program bantuan belajar Program Indonesia Pintar (PIP) belum mampu menjangkau anak-anak miskin dan terlantar. Ironisnya, Pemerintah daerah (Pemda) seakan tutup mata dengan kondisi ini.

ANGGOTA Komisi X DPR Nuroji mengatakan, ada indikasi para kepala sekolah negeri enggan menyerahkan data-data siswa kurang mampu dan layak dibantu Pemerintah untuk mendapatkan bantuan PIP. Kuat dugaan karena masalah PIP ini dikait-kaitkan dengan perhelatan tahun politik yang berlangsung tahun ini.

"Tapi sebenarnya itu sudah beberapa tahun sehingga (dana PIP aspirasi) lebih banyak saya salurkan ke swasta," kata politisi Fraksi Gerindra ini, kemarin.

Nuroji lalu menyinggung kebutuhan pendidikan bagi masyarakat miskin. Mereka ini kebanyakan berasal dari keluarga yang tidak memiliki rumah, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), pemulung, tunawisma dan anak-anak yatim yang hidup di jalanan.

Mereka adalah warga miskin kota yang tidak tersentuh pendidikan dari Pemerintah.

"Saya tahu ini tugasnya Dinas Sosial (Dinsos), tapi di kota kami ini masih banyak persoalan-persoalan seperti ini. Mungkin kementerian bisa memberikan pembinaan kepada dinas-dinas sosial di kota-kota supaya jangan setiap tahun berlangsung. Jadi banyak tidak sekolah," ujarnya.

Bahkan dia mendapati ada sekolah di Depok, Jawa Barat, menampung anak-anak miskin, terlantar, kurang mendapat dukungan dari Pemerintah daerah. Sekolah ini bukan sekolah formal, semacam sekolah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

"Di sana sudah bertahun-tahun melakukan pendidikan non formal, menampung pendidikan mereka, makan mereka dan



Di sana sudah bertahun-tahun melakukan pendidikan non formal, menampung pendidikan mereka, makan mereka dan semua diurus seperti yayasan dan sama sekali tidak diperhatikan Pemerintah.

semua diurus seperti yayasan dan sama sekali tidak diperhatikan Pemerintah," sesalnya.

Nuroji tahu persis sekolah tersebut karena sudah sering berkunjung ke sana. Sekolah ini bisa bertahan sampai sekarang karena ada donatur dari masyarakat, dan relawan-relawan dari

kampus dan masyarakat umum yang mau mengajar di sana.

Adapun sekolah tersebut bernama Sekolah Master (Masjid Terminal) karena letaknya berada di masjid terminal, tak jauh dari kantor pemerintahan. "Ini letaknya persis di depan gedung kantor wali kota dan satu hari pun tidak pernah wali kota itu melihat sekolah itu," sebutnya.

Untuk itu, dia berharap Pemerintah pusat, dapat melakukan pembinaan kepada Dinsos di Kota Depok. Sebab, Pemerintah daerah terkesan sangat menutup mata terhadap sekolah PKBM ini. Padahal Kota Depok sendiri sering mendapat penghargaan sebagai Kota Layak Anak.

"Nyatanya di lapangan banyak sekali warganya yang mungkin tidak punya KK, orang tua, dan ditampung oleh satu lembaga yang sama sekali tidak mendapat bantuan dari Pemerintah," pungkasnya.

Sementara anggota Komisi X DPR Ferdiansyah mengungkapkan empat catatan pen-

ting terkait dengan evaluasi PIP. Yakni, terkait persoalan data, keterbatasan layanan dan sumber daya manusia, kepastian waktu, dan sosialisasi.

Dia meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) bersama Kementerian Sosial (Kemensos) dan bank penyalur berkoordinasi demi memecahkan permasalahan tersebut. "Koordinasi ini penting untuk untuk memecahkan empat hal itu. Ini kami sampaikan secara objektif, semata-mata demi perbaikan, tidak mencari-cari kesalahan," terangnya.

Dia juga mendorong agar layanan pengurusan PIP dipermudah untuk meminimalisir terjadinya pemotongan dana ilegal pada tiap tahapan-tahapan pengurusan PIP. Kemudahan pengurusan ini sangat penting sebab terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia. "Untuk data saja ini sulit kita peroleh. Padahal kalau ini data terbuka, berarti ada informasi keterbukaan publik," ujarnya. ■ KAL